

**PENGARUH BANTUAN SOSIAL TUNAI TERHADAP
KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI
KOTA PALEMBANG**

(Ujian Tengah Semester)

Oleh

Farah Diba Putri Khotima

NPM 2416041103



PROGRAM STUDI ILMU ADMNISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Teori Kebijakan Publik.....	12
2.2.1 Konsep Umum Kebijakan Publik	12
2.2.2 Model dan Pendekatan dalam Kebijakan Publik	14
2.2.3 Fungsi Kebijakan Sosial dalam Konteks Kesejahteraan	16
2.3 Teori Implementasi Kebijakan	17
2.3.1 Konsep Implementasi Kebijakan	17
2.3.2 Model Implementasi Kebijakan.....	18
2.3.3 Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan.....	21
2.3.4 Hambatan Implementasi Kebijakan di Sektor Sosial	22
2.4 Teori Administrasi Negara dan Pelayanan Publik.....	23
2.4.1 Teori New Public Service (Denhardt & Denhardt)	23
2.4.2 Konsep Good Governance	25
2.5 Teori Kesejahteraan Sosial	27
2.5.1 Konsep Kesejahteraan Sosial.....	27
2.5.2 Indikator Kesejahteraan Ekonomi Keluarga.....	29
2.6 Kerangka Berpikir	30
2.7 Hipotesis Penelitian	32
III. METODELOGI PENELITIAN	33
3.1 Tipe Penelitian.....	33
3.2 Populasi dan Sampel	33
3.2.1 Populasi Penelitian.....	33
3.2.2 Sampel Penelitian	34
3.3 Variabel Penelitian	35

3.4 Distribusi Sampel Penelitian	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5.1 Pendekatan Umum Pengumpulan Data	38
3.5.2 Teknik Dokumentasi.....	38
3.5.3 Teknik Studi Kepustakaan (Library Research).....	39
3.6 Validitas dan Reliabilitas Data	40
DAFTAR PUSTAKA	42

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam pembangunan nasional di Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan tingkat ketimpangan sosial yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2025 mencapai 25,6 juta jiwa (9,04%), mengalami penurunan tipis sebesar 0,11 persen dibandingkan September 2024 (BPS, 2025). Meskipun angka tersebut menunjukkan tren positif, persoalan kesejahteraan ekonomi rumah tangga miskin tetap menjadi isu krusial yang perlu direspons secara komprehensif melalui kebijakan sosial yang efektif.

Salah satu instrumen utama pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi adalah program bantuan sosial (bansos). Bantuan sosial tunai (BST), sebagai bentuk transfer langsung dalam program jaring pengaman sosial, berfungsi untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga berpendapatan rendah. Menurut Hadna dan Askar (2022), program transfer tunai bersyarat maupun tidak bersyarat terbukti memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kemampuan ekonomi rumah tangga miskin, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kerentanan terhadap guncangan ekonomi.

Program BST di Indonesia terus mengalami penyesuaian dari masa pandemi hingga kini. Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) kembali menyalurkan berbagai bentuk bansos pada tahun 2025, dengan total alokasi anggaran mencapai Rp 10 triliun untuk lebih dari 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) (Kemensos, 2025). Skema ini terdiri atas tiga program utama: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Tujuannya adalah menjaga stabilitas sosial ekonomi

masyarakat miskin dan mempercepat pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan pemerintah dalam RPJMN 2020–2025.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas bantuan sosial tunai tidak selalu sejalan dengan tujuan kebijakan. Matondang et al. (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa penyaluran bantuan sosial di Indonesia berkontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan, tetapi dampaknya cenderung bersifat jangka pendek karena bantuan lebih banyak digunakan untuk konsumsi rutin daripada peningkatan produktivitas ekonomi. Sementara itu, penelitian *The Impact of Cash Transfer on Household Spending Behaviour* (Atlantis Press, 2023) menunjukkan bahwa penerima bantuan sosial cenderung meningkatkan pengeluaran konsumtif (pangan dan kebutuhan rumah tangga), namun belum signifikan dalam investasi jangka panjang seperti pendidikan atau modal usaha kecil.

Permasalahan lain yang turut menghambat efektivitas program adalah ketidaktepatan sasaran dan validitas data penerima manfaat. Berdasarkan laporan Kementerian PAN-RB (2025), ditemukan sekitar 1,9 juta penerima ganda dan tidak layak yang kemudian dihapus dari daftar penerima bansos nasional pada triwulan pertama tahun 2025. Hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme verifikasi dan pembaruan data kesejahteraan masyarakat masih menghadapi kendala teknis dan birokratis. Akibatnya, dampak program terhadap kesejahteraan ekonomi sering kali tidak terukur secara optimal.

Situasi tersebut juga terjadi di tingkat daerah, termasuk di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang menjadi salah satu daerah dengan jumlah penerima bansos cukup tinggi di Pulau Sumatera. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Palembang (2025), sebanyak 48.900 keluarga terdaftar sebagai penerima manfaat dari program BST dan PKH, dengan cakupan distribusi mencapai sekitar 88 persen dari total sasaran. Kecamatan Seberang Ulu II tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penerima tertinggi, yaitu 12.812 KPM, diikuti oleh Kecamatan Kertapati dan Ilir Timur II (Rahardi, Kariem, & Febriyanti, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa bantuan sosial memiliki peran penting dalam

menopang kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah di kota besar seperti Palembang.

Namun, belum banyak penelitian kuantitatif yang secara spesifik menilai pengaruh bantuan sosial tunai terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat di Kota Palembang. Padahal, dari perspektif teori pembangunan ekonomi (Todaro & Smith, 2020), kesejahteraan ekonomi mencakup lebih dari sekadar peningkatan pendapatan; ia juga mencakup kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, memperbaiki kondisi kesehatan, meningkatkan produktivitas, serta memiliki akses terhadap peluang ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas bantuan sosial perlu dilakukan melalui pendekatan empiris yang menilai hubungan antara variabel bantuan sosial dan indikator kesejahteraan ekonomi penerima.

Dalam konteks kebijakan publik, Dunn (2018) menegaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan harus diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut menghasilkan perubahan nyata pada kelompok sasaran. Artinya, keberhasilan program bantuan sosial tunai tidak cukup diukur dari jumlah penerima atau realisasi anggaran, tetapi dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana bantuan sosial tunai berkontribusi terhadap peningkatan kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat di Palembang, baik dalam hal pendapatan, konsumsi, maupun kemampuan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, penelitian ini memiliki relevansi praktis dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan sosial di tingkat daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Palembang dan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam meningkatkan akurasi pendataan penerima, memperbaiki mekanisme distribusi bantuan, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana bansos agar tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pula dapat mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan prinsip good governance yang berorientasi pada efektivitas kebijakan, transparansi, dan keadilan sosial.

1.2 Rumusan Masalah

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menekan angka kemiskinan, terutama pada kelompok rentan ekonomi. Namun, implementasi program ini di berbagai daerah, termasuk di Kota Palembang, masih menghadapi sejumlah persoalan seperti ketepatan sasaran, efektivitas penyaluran, dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat penerima manfaat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang?
2. Bagaimanakah tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang?
3. Sejauh mana pengaruh Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang.
2. Untuk menganalisis tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang.
3. Untuk menganalisis pengaruh Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat penerima manfaat di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam bidang Administrasi Publik, khususnya pada studi analisis dan evaluasi kebijakan sosial. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya penerapan teori Analisis Kebijakan Publik menurut William N. Dunn (2018), terutama dalam menilai efektivitas suatu kebijakan sosial berbasis bukti (evidence-based policy).

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi:

1. Masukan bagi Pemerintah Kota Palembang, khususnya Dinas Sosial, dalam meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program Bantuan Sosial Tunai (BST).
2. Bahan evaluasi bagi Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam perbaikan mekanisme penyaluran dan verifikasi data penerima bantuan sosial.
3. Referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan kajian kuantitatif mengenai dampak kebijakan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, khususnya skripsi, peninjauan terhadap penelitian terdahulu merupakan langkah penting yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana topik yang diteliti telah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Kajian ini menjadi dasar untuk menghindari pengulangan penelitian, sekaligus menemukan celah penelitian (research gap) yang dapat dijadikan pijakan bagi penelitian baru.

Menurut Sugiyono (2019), penelitian terdahulu berperan penting dalam membangun kerangka berpikir yang sistematis, karena mampu memperlihatkan hubungan antara teori dan realitas empiris dari hasil penelitian yang sudah ada. Dengan menelaah penelitian sebelumnya, peneliti dapat memperoleh gambaran tentang variabel-variabel yang relevan, metode yang efektif digunakan, serta hasil-hasil yang dapat dibandingkan dengan konteks penelitian yang sedang dilakukan.

Dalam konteks penelitian ini, kajian terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk melihat bagaimana pengaruh bantuan sosial tunai (BST) telah diuji terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Selain itu, tinjauan ini juga membantu memperkuat dasar empiris bahwa permasalahan efektivitas BST bukan hanya isu nasional, tetapi juga berdampak nyata di tingkat daerah, termasuk Kota Palembang.

Oleh karena itu, peneliti menelaah beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik *“Pengaruh Bantuan Sosial Tunai terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat di Kota Palembang.”* Tiga penelitian berikut dipilih karena memiliki kesamaan tema, ruang lingkup, dan relevansi metodologis dengan penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Jenis/Metode	Hasil Temuan Utama
Nanda Salsabila, Nilna Muna, Vikko Hilmi Pradana, & Wirawan Firman Nurcahya (2024)	<i>Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia – Journal of Macroeconomics and Social Development, 1(4)</i>	Studi Kepustakaan (Library Research)	Program bantuan sosial, termasuk BST, dinilai kurang efektif dalam menekan kemiskinan nasional karena masalah ketepatan sasaran dan data penerima. Namun, bantuan ini tetap berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan ekonomi.
Nurul Azizah & Riza Rahmawati (2024)	<i>Pengaruh Program Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Ngijo – Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang</i>	Kuantitatif Deskriptif	Menunjukkan bahwa BST berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pada aspek pendapatan dan konsumsi rumah tangga, meskipun belum mampu menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang.
Rahardi, Kariem, & Febriyanti (2023)	<i>Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai pada</i>	Kualitatif Deskriptif	Pelaksanaan BST di Kota Palembang cukup efektif, tetapi menghadapi kendala pada validasi data,

	<i>Masa Pandemi COVID-19 di Kota Palembang – JISIP UNJA, 7(1)</i>		keterlambatan distribusi, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat.
--	---	--	---

Sumber: Data diolah oleh peneliti dari Salsabila et al. (2024); Azizah & Rahmawati (2024); Rahardi et al. (2023).

Analisis Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada tabel sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa persamaan, perbedaan, serta celah penelitian (research gap) yang menjadi dasar penting bagi penelitian mengenai pengaruh Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat di Kota Palembang.

Persamaan:

Ketiga penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program Bantuan Sosial Tunai (BST) berperan positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli dan meringankan beban ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah. Selain itu, seluruh penelitian tersebut menyoroti bahwa ketepatan sasaran, validitas data penerima manfaat, dan efektivitas mekanisme distribusi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial.

Perbedaan:

Perbedaan utama di antara penelitian terdahulu terletak pada cakupan wilayah, metode penelitian, serta fokus analisis yang digunakan.

1. Penelitian Salsabila et al. (2024) berskala nasional dan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis efektivitas program bansos terhadap kemiskinan secara umum.
2. Penelitian Azizah dan Rahmawati (2024) menggunakan metode kuantitatif deskriptif di tingkat desa (Desa Ngijo) untuk mengukur pengaruh BST

terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga, dengan hasil bahwa bantuan tunai berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan konsumsi, namun belum berkelanjutan.

3. Sedangkan penelitian Rahardi, Kariem, dan Febriyanti (2023) menitikberatkan pada implementasi kebijakan BST di Kota Palembang melalui pendekatan kualitatif deskriptif, dan menemukan adanya kendala pada validasi data, distribusi bantuan, serta sosialisasi kebijakan.

Celah Penelitian (Research Gap):

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, masih terdapat ruang penelitian yang dapat dikembangkan, yaitu kajian yang mengukur secara kuantitatif pengaruh Bantuan Sosial Tunai terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat di Kota Palembang. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas aspek implementasi dan efektivitas secara umum, tanpa mengukur hubungan langsung antara variabel bantuan sosial dan tingkat kesejahteraan ekonomi penerima di tingkat rumah tangga.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis empiris yang berfokus pada hubungan antara penerimaan Bantuan Sosial Tunai dan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat di Kota Palembang. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian kebijakan sosial dan menjadi masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penyaluran program bantuan sosial.

2.2 Teori Kebijakan Publik

2.2.1 Konsep Umum Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan instrumen pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan, pemerataan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Dunn (2018), kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan publik. Definisi ini menegaskan

bahwa kebijakan publik tidak hanya sebatas dokumen formal, melainkan suatu proses dinamis yang melibatkan perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi untuk mencapai tujuan sosial.

Dye (2017) memberikan pengertian sederhana namun mendalam bahwa kebijakan publik adalah “*whatever governments choose to do or not to do.*” Artinya, segala sesuatu yang diputuskan atau diabaikan oleh pemerintah memiliki konsekuensi terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan publik harus dipahami sebagai upaya sadar pemerintah dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat demi mencapai kesejahteraan umum (*public welfare*).

Pandangan ini diperkuat oleh Easton yang memandang kebijakan publik sebagai *output* dari sistem politik yang berasal dari masukan (*input*) berupa tuntutan masyarakat dan dukungan politik (Alianti et al., 2024). Kebijakan kemudian menghasilkan hasil (*output*) berupa program dan regulasi yang berdampak kembali pada masyarakat sebagai *feedback*. Dalam kerangka penelitian ini, *Bantuan Sosial Tunai (BST)* dapat dipandang sebagai *output kebijakan sosial* hasil dari proses tuntutan publik terhadap perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, yang kemudian dievaluasi secara berkelanjutan melalui umpan balik masyarakat dan pemerintah daerah.

Sejalan dengan itu, Parsons (2018) menyebut kebijakan publik sebagai instrumen yang menghubungkan antara niat politik dengan tindakan administratif. Setiap kebijakan publik mencerminkan nilai dan ideologi tertentu yang dianut oleh pemerintah, misalnya nilai keadilan, kesejahteraan, atau pemerataan. Oleh karena itu, kebijakan bantuan sosial merupakan bentuk konkret dari komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Kebijakan publik modern harus berbasis bukti empiris (*evidence-based policy*). Menurut Loso, Yumame, & Pugu (2024), kebijakan yang didasarkan pada data dan analisis empiris akan menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan kebijakan yang hanya bersifat reaktif. Di Indonesia, hal ini mulai diterapkan dalam penyusunan program perlindungan sosial seperti BST melalui penggunaan *Data*

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan memverifikasi masyarakat penerima manfaat agar kebijakan lebih tepat sasaran.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan proses politik dan administratif yang saling berhubungan, yang diarahkan untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, BST berperan sebagai kebijakan publik yang berorientasi pada pemerataan sosial dan penguatan daya beli masyarakat miskin di Kota Palembang.

2.2.2 Model dan Pendekatan dalam Kebijakan Publik

Dalam studi kebijakan publik, terdapat beberapa model dan pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Model-model ini membantu menjelaskan proses serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan, terutama kebijakan sosial seperti Bantuan Sosial Tunai.

1. Model Sistem (David Easton)

Model sistem yang dikemukakan oleh David Easton (1965) menempatkan kebijakan publik sebagai bagian dari sistem politik yang terdiri atas *input*, *process*, *output*, dan *feedback*.

- *Input* berupa tuntutan dan dukungan masyarakat,
- *Process* berupa aktivitas pemerintah dalam merumuskan kebijakan,
- *Output* berupa keputusan dan program kebijakan,
- dan *Feedback* berupa tanggapan dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Penelitian Alianti, Erawan, & Erviantono (2024) menunjukkan bahwa teori sistem Easton masih relevan digunakan untuk menganalisis proses perumusan kebijakan di Indonesia, karena menggambarkan hubungan antara tekanan sosial-politik dan keputusan pemerintah. Dalam konteks BST, model ini menjelaskan bahwa kebijakan bantuan sosial lahir sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat

berpenghasilan rendah terhadap stabilitas ekonomi, serta menjadi mekanisme pemerintah untuk mengembalikan keseimbangan sosial (*social equilibrium*).

2. Model Rasional Komprehensif (Herbert Simon dan Dye)

Model ini menekankan bahwa kebijakan publik harus diambil melalui proses yang rasional, sistematis, dan mempertimbangkan seluruh alternatif yang ada sebelum memilih keputusan terbaik. Dye (2017) menjelaskan bahwa model rasional membantu pemerintah mengevaluasi biaya dan manfaat setiap alternatif kebijakan untuk mencapai efisiensi maksimal. Dalam konteks program BST, pendekatan rasional berarti pemerintah menyalurkan bantuan berdasarkan perhitungan yang matang mengenai kemampuan fiskal, data penerima, serta potensi dampak ekonomi dan sosialnya.

3. Model Siklus Kebijakan (Policy Cycle)

Model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik melalui enam tahap: perumusan masalah, penetapan agenda, formulasi kebijakan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi (Cairney, 2012). Setiap tahap memiliki aktor dan dinamika yang berbeda. Dalam pelaksanaan BST, proses perumusan dilakukan oleh pemerintah pusat, implementasi di bawah koordinasi Kementerian Sosial dan Dinas Sosial daerah, sedangkan evaluasi dilakukan berdasarkan laporan efektivitas dan ketepatan sasaran penerima.

Menurut Yanti & Fauzi (2023), tahapan implementasi dan evaluasi menjadi kunci keberhasilan kebijakan sosial, karena seringkali kegagalan terjadi bukan pada rumusan kebijakan, tetapi pada pelaksanaannya di lapangan.

4. Pendekatan Analisis Kebijakan (William N. Dunn)

Menurut Dunn (2018), analisis kebijakan berperan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ia mengemukakan lima kriteria utama dalam evaluasi kebijakan:

1. Efektivitas, yakni sejauh mana tujuan kebijakan tercapai.

2. Efisiensi, yaitu perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan.
3. Kecukupan (adequacy), yaitu kemampuan kebijakan dalam mengatasi masalah secara memadai.
4. Pemerataan (equity), yakni sejauh mana kebijakan memberikan manfaat secara adil.
5. Responsivitas, yaitu kemampuan kebijakan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, kelima kriteria tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana BST efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat di Kota Palembang.

5. Pendekatan Jaringan Pemerintahan (Governance Network)

Pendekatan ini menyoroti bahwa kebijakan publik tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai aktor seperti masyarakat, lembaga swadaya, dan sektor swasta. Kebijakan sosial modern di Indonesia kini bergerak menuju pola *mixed welfare*, di mana negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor utama, tetapi berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam penyaluran dan pengawasan program sosial. Pendekatan ini penting untuk memahami peran koordinatif antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kota Palembang, kelurahan, dan masyarakat penerima manfaat dalam implementasi BST (Yuda. 2023).

2.2.3 Fungsi Kebijakan Sosial dalam Konteks Kesejahteraan

Kebijakan sosial merupakan bentuk nyata dari kebijakan publik yang berfokus pada upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta melindungi kelompok rentan. Menurut Mas'udi & Hanif (2023), kebijakan sosial di Indonesia merupakan manifestasi dari politik kesejahteraan (*welfare politics*) yang menekankan peran negara dalam menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh warga negara.

Kebijakan sosial berfungsi untuk:

1. Memberikan perlindungan sosial (social protection) bagi masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi (economic welfare) melalui intervensi fiskal dan bantuan tunai.
3. Menjamin keadilan sosial (social justice) dengan mengurangi kesenjangan pendapatan.
4. Meningkatkan inklusivitas sosial (social inclusion) dengan memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi.

Menurut Holden (2020), kebijakan sosial yang efektif harus mampu mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia, Supakitpaian (2024) menjelaskan bahwa pengelolaan kesejahteraan sosial harus berbasis komunitas dan memperhatikan nilai-nilai lokal agar kebijakan lebih diterima dan berkelanjutan.

BST sebagai salah satu instrumen kebijakan sosial memiliki peran strategis dalam menjaga daya beli masyarakat miskin, terutama di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Penelitian Loso et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berbasis bantuan tunai terbukti mampu mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga dan menekan angka kemiskinan jangka pendek, meskipun belum sepenuhnya menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang.

Dengan demikian, kebijakan sosial seperti BST tidak hanya berfungsi sebagai bentuk intervensi ekonomi, tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak dasar warganya untuk hidup layak dan sejahtera. Fungsi kebijakan sosial ini sejalan dengan prinsip administrasi publik yang menekankan pelayanan publik berkeadilan dan berpihak pada masyarakat miskin.

2.3 Teori Implementasi Kebijakan

2.3.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan paling krusial dalam proses kebijakan karena menentukan sejauh mana keputusan pemerintah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi

kebijakan adalah pelaksanaan keputusan politik dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan, atau keputusan pemerintah, yang bertujuan untuk menghasilkan hasil tertentu di masyarakat. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis, tetapi juga proses politik, koordinasi antar lembaga, dan kemampuan birokrasi dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata.

Dalam konteks administrasi publik, implementasi kebijakan berperan sebagai jembatan antara perumusan kebijakan (*policy formulation*) dan hasil kebijakan (*policy outcome*). Sebuah kebijakan yang baik dapat gagal apabila tidak diimplementasikan secara efektif. Hal ini ditegaskan oleh Nugroho (2020) yang menyatakan bahwa “tantangan terbesar kebijakan publik di Indonesia bukan pada perumusannya, melainkan pada tahap implementasi yang seringkali tidak sesuai dengan tujuan awal.”

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan contoh nyata dari kebijakan yang keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas implementasi. Walaupun memiliki desain yang baik, BST sering menghadapi kendala di lapangan, seperti keterlambatan penyaluran, data penerima yang tidak akurat, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

2.3.2 Model Implementasi Kebijakan

1. Model George C. Edwards III (1980)

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy* (1980) merupakan salah satu teori paling populer dan sering digunakan dalam kajian administrasi publik. Edwards menekankan empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Komunikasi (Communication)

Kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada pelaksana agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Menurut Setiawan & Hartono (2021) dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*,

komunikasi yang tidak efektif sering menjadi penyebab utama ketidaktepatan implementasi kebijakan bantuan sosial di Indonesia.

2. Sumber Daya (Resources)

Tanpa dukungan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana yang memadai, kebijakan tidak dapat berjalan efektif. Kementerian Sosial RI (2024) dalam laporannya mencatat bahwa keterbatasan tenaga pendata dan anggaran operasional menjadi kendala utama dalam distribusi BST di berbagai daerah, termasuk Palembang.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana (Disposition)

Sikap, komitmen, dan motivasi pelaksana kebijakan menentukan keberhasilan implementasi. Jika pelaksana tidak memahami tujuan kebijakan atau tidak memiliki komitmen, implementasi akan berjalan formalitas semata (Rahardi et al., 2023).

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur birokrasi yang terlalu hierarkis dan prosedural dapat memperlambat implementasi. Menurut Winarno (2018), struktur birokrasi yang tidak fleksibel sering menjadi penyebab keterlambatan penyaluran bantuan sosial di Indonesia.

Edwards menekankan bahwa keempat faktor tersebut saling berkaitan dan harus berjalan harmonis agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks BST, jika komunikasi kebijakan dari pemerintah pusat ke daerah tidak berjalan baik, atau jika struktur birokrasi lambat, maka tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai.

2. Model Van Meter dan Van Horn (1975)

Model implementasi Van Meter & Van Horn (1975) menekankan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh *hubungan antara kebijakan dengan*

kondisi lingkungan politik, sosial, dan ekonomi. Model ini dikenal sebagai A Model of the Policy Implementation Process, yang mencakup enam variabel utama:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy Standards and Objectives)

Tujuan kebijakan harus jelas dan terukur agar pelaksana memiliki panduan yang tepat. Dalam kasus BST, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan menjaga daya beli masyarakat.

2. Sumber Daya (Resources)

Meliputi dana, tenaga kerja, fasilitas, dan data penerima. Jika sumber daya tidak memadai, implementasi akan gagal mencapai sasaran (Lestari & Ramadhani, 2022).

3. Karakteristik Agen Pelaksana (Implementing Agency Characteristics)

Termasuk kemampuan teknis, kepemimpinan, serta koordinasi antara lembaga. Dalam konteks BST, agen pelaksana mencakup Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kota, serta perangkat kelurahan.

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan (Interorganizational Communication) Komunikasi antarinstansi menentukan kelancaran koordinasi dan distribusi bantuan.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (Economic, Social, Political Conditions)

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Dalam konteks Palembang, disparitas ekonomi antarwilayah serta faktor budaya turut memengaruhi persepsi terhadap bantuan sosial.

6. Kecenderungan atau Disposisi Pelaksana (Disposition of Implementers) Sikap pelaksana kebijakan terhadap program sangat menentukan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Model ini menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai aktor dan kondisi lingkungan.

2.3.3 Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (2019), implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila:

1. Tujuan kebijakan tercapai sesuai dengan perencanaan.
2. Proses pelaksanaan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
3. Ada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak nyata dari kebijakan.

Dalam konteks Bantuan Sosial Tunai di Indonesia, beberapa faktor keberhasilan implementasi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Data dan Ketepatan Sasaran

Penggunaan *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)* menjadi kunci utama ketepatan sasaran penerima bantuan. Menurut Kemensos RI (2025), validasi data yang berkala terbukti meningkatkan akurasi distribusi hingga 92%.

2. Keterlibatan Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Keberhasilan implementasi meningkat apabila pemerintah daerah aktif dalam verifikasi data dan sosialisasi program (Loso et al., 2024).

3. Koordinasi Antar Lembaga

Komunikasi lintas instansi seperti antara Kemensos, Dinas Sosial, dan perangkat kelurahan harus berjalan efektif agar tidak terjadi tumpang tindih data penerima.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Keterbukaan informasi publik mengenai daftar penerima bantuan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan dana (CNN Indonesia, 2024).

2.3.4 Hambatan Implementasi Kebijakan di Sektor Sosial

Implementasi kebijakan sosial seperti BST tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik bersifat teknis maupun struktural. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB (2024) dan berbagai studi akademik, hambatan-hambatan tersebut meliputi:

1. Ketidaktepatan Data Penerima

Banyak kasus penerima bantuan ganda atau masyarakat miskin yang belum terdaftar dalam DTKS. Kompas (2024) melaporkan bahwa sekitar 1,9 juta data penerima bantuan sosial nasional terindikasi tidak valid dan harus diperbarui.

2. Keterlambatan Penyaluran Bantuan

Proses birokrasi yang panjang dan perbedaan sistem antar lembaga menyebabkan bantuan tidak selalu tepat waktu, khususnya di daerah terpencil (Rahardi et al., 2023).

3. Kurangnya Kapasitas Aparatur Pelaksana

Aparatur di tingkat kelurahan/desa sering kali memiliki keterbatasan dalam penggunaan aplikasi *SIKS-NG* (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation), sehingga memperlambat input data penerima.

4. Minimnya Partisipasi Masyarakat

Kurangnya pemahaman penerima manfaat mengenai tujuan kebijakan sering menyebabkan bantuan digunakan untuk kebutuhan konsumtif, bukan produktif (Matondang et al., 2024).

5. Pengaruh Kondisi Sosial dan Politik Lokal

Di beberapa daerah, implementasi kebijakan sosial rentan terhadap kepentingan politik lokal, terutama menjelang pemilu, yang dapat mengganggu objektivitas penyaluran bantuan (Detik, 2024).

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sosial sangat dipengaruhi oleh sinergi antara desain kebijakan, kapasitas pelaksana, dan kondisi sosial masyarakat.

Berdasarkan teori Edwards III dan Van Meter & Van Horn, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses kompleks yang menuntut koordinasi, komunikasi, sumber daya, dan komitmen pelaksana yang kuat. Keberhasilan program Bantuan Sosial Tunai di Kota Palembang bergantung pada sejauh mana keempat komponen tersebut dijalankan secara efektif, serta bagaimana hambatan-hambatan teknis dan sosial dapat diatasi melalui reformasi birokrasi, validasi data, dan partisipasi publik.

2.4 Teori Administrasi Negara dan Pelayanan Publik

2.4.1 Teori New Public Service (Denhardt & Denhardt)

Paradigma *New Public Service (NPS)* dikembangkan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt (2003, diperbarui 2015) sebagai respons terhadap kelemahan paradigma sebelumnya yaitu *New Public Management (NPM)* yang terlalu menekankan efisiensi dan pendekatan bisnis dalam birokrasi publik. Menurut Denhardt & Denhardt, administrasi publik tidak seharusnya hanya berfungsi seperti korporasi yang mengejar efisiensi, melainkan harus menempatkan warga negara sebagai fokus utama pelayanan.

Denhardt & Denhardt (2015) menegaskan bahwa hakikat pelayanan publik adalah *“to serve citizens, not customers.”* Artinya, masyarakat bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga subjek yang berhak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah seharusnya berperan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang dialog antara negara dan warga negara.

Lebih lanjut, Denhardt & Denhardt (2020) mengemukakan tujuh prinsip utama dalam paradigma *New Public Service*, yaitu:

1. Pelayanan, bukan pengendalian. Pemerintah berfokus untuk melayani masyarakat, bukan mengatur secara otoriter.
2. Nilai publik di atas kepentingan pribadi. Kebijakan publik harus mencerminkan kepentingan umum.
3. Partisipasi warga negara. Masyarakat dilibatkan dalam perumusan dan pengawasan kebijakan.
4. Kepemimpinan kolaboratif. Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil.
5. Akuntabilitas ganda. Pemerintah bertanggung jawab kepada publik, bukan hanya kepada atasan atau lembaga politik.
6. Demokrasi partisipatif. Pelayanan publik harus berakar pada nilai-nilai demokrasi.
7. Etika pelayanan publik. Integritas, keadilan, dan empati menjadi dasar perilaku birokrasi.

Paradigma ini sangat relevan dalam konteks pelaksanaan program Bantuan Sosial Tunai (BST), di mana keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh efisiensi administratif, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat penerima merasa dihargai dan dilibatkan. Menurut Hutabarat (2022) dalam *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Airlangga*, penerapan prinsip *New Public Service* pada program bansos mampu meningkatkan kepuasan penerima manfaat karena pemerintah lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Selain itu, Yuliani & Siregar (2023) dalam *Jurnal Borneo Administrator* menegaskan bahwa penerapan paradigma *New Public Service* di pemerintahan daerah dapat memperkuat legitimasi birokrasi publik, karena masyarakat merasa dilayani dengan empati dan keadilan. Dalam konteks Kota Palembang, paradigma ini dapat mendorong Dinas Sosial untuk lebih transparan dan komunikatif dalam proses pendataan dan penyaluran BST.

Dengan demikian, teori *New Public Service* memberikan landasan normatif dan etis bahwa birokrasi publik tidak hanya harus efisien, tetapi juga manusiawi, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan warga negara.

2.4.2 Konsep Good Governance

Selain paradigma *New Public Service*, teori lain yang sangat relevan dalam penelitian ini adalah konsep Good Governance, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN RI, 2021), *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, yang berorientasi pada kepentingan publik serta didasarkan pada supremasi hukum.

Sementara itu, UNDP (2018) mendefinisikan *Good Governance* sebagai “the exercise of economic, political and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels in a manner that is transparent, accountable, equitable, and responsive to people’s needs.” Definisi ini menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya dilihat dari aspek prosedural, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan publik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut UNDP (2018), terdapat delapan prinsip utama *Good Governance*, yaitu:

1. Partisipasi (Participation) : Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
2. Supremasi hukum (Rule of Law) : Pemerintah harus menjunjung tinggi hukum dan keadilan.
3. Transparansi (Transparency) : Kebijakan publik dan prosesnya harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
4. Daya tanggap (Responsiveness) : Pemerintah harus cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Konsensus (Consensus Orientation) : Kebijakan harus mencerminkan kepentingan bersama.
6. Keadilan dan Inklusivitas (Equity and Inclusiveness) : Semua kelompok masyarakat memiliki hak yang sama untuk dilayani.

7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) : Sumber daya publik harus digunakan dengan optimal.
8. Akuntabilitas (Accountability) : Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada masyarakat.

Dalam konteks kebijakan sosial seperti BST, prinsip *Good Governance* menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman agar program bantuan disalurkan secara transparan, adil, dan tepat sasaran. Menurut Kementerian PAN-RB (2024), penerapan prinsip *Good Governance* di sektor sosial telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, khususnya melalui keterbukaan informasi dan mekanisme pengaduan publik.

Selain itu, Loso, Yumame, & Pugu (2024) dalam *ADMIN: Jurnal Administrasi Negara* menegaskan bahwa efektivitas program sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan daerah, termasuk koordinasi antarinstansi dan partisipasi warga dalam evaluasi program.

Penerapan prinsip *Good Governance* juga penting untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan atau politisasi bantuan sosial. Misalnya, dalam laporan Kompas (2024), ditemukan bahwa keterbukaan data penerima bantuan secara daring mampu menekan potensi penyelewengan dana bansos di berbagai daerah.

Dengan demikian, *Good Governance* menjadi kerangka normatif bagi birokrasi publik di Kota Palembang agar pelaksanaan BST berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat miskin sebagai penerima manfaat utama.

Kedua teori di atas saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya menjalankan perannya dalam pelayanan publik.

- New Public Service (NPS) menekankan *orientasi nilai dan partisipasi masyarakat*,
- Sedangkan Good Governance menekankan *tata kelola dan akuntabilitas*.

Dalam penelitian ini, kedua teori digunakan untuk memahami bahwa efektivitas program Bantuan Sosial Tunai tidak hanya bergantung pada efisiensi birokrasi, tetapi juga pada sejauh mana pemerintah menerapkan nilai-nilai pelayanan publik yang humanis, demokratis, dan transparan. Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan dengan baik, maka tujuan utama kebijakan sosial yakni peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat akan lebih mudah tercapai.

2.5 Teori Kesejahteraan Sosial

2.5.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama dari setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara umum, kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, hidup dalam lingkungan yang aman dan stabil, serta memiliki kesempatan untuk berkembang secara sosial dan ekonomi.

Menurut Titmuss (1974 dalam Midgley, 2020), kesejahteraan sosial merupakan hasil dari kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Titmuss memandang kesejahteraan sosial bukan hanya sebagai kondisi material, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara kebijakan, lembaga sosial, dan nilai kemanusiaan yang dipegang oleh suatu masyarakat. Dalam konteks administrasi publik, pandangan Titmuss menegaskan bahwa kebijakan sosial seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan warganya.

Sementara itu, Maslow (1954; direvisi 2019) melalui teori *Hierarchy of Needs* menjelaskan bahwa kesejahteraan seseorang ditentukan oleh sejauh mana kebutuhan dasarnya terpenuhi. Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi lima tingkatan:

1. Kebutuhan fisiologis (pangan, sandang, papan, kesehatan),
2. Kebutuhan rasa aman,

3. Kebutuhan sosial (hubungan dan rasa memiliki),
4. Kebutuhan penghargaan, dan
5. Kebutuhan aktualisasi diri.

Menurut Maslow, kesejahteraan dapat dicapai apabila kebutuhan dasar terpenuhi terlebih dahulu. Dalam konteks kebijakan sosial, BST membantu masyarakat memenuhi kebutuhan fisiologis dan keamanan ekonomi dasar, yang menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup yang lebih tinggi.

Kemudian, Todaro dan Smith (2020) dalam bukunya *Economic Development* menjelaskan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk memiliki akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka menekankan bahwa pembangunan ekonomi sejati adalah pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people-centered development*), bukan sekadar pertumbuhan angka PDB.

Todaro (2020) menggarisbawahi tiga nilai inti pembangunan yang menjadi indikator kesejahteraan, yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar (sustenance) – kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, dan tempat tinggal.
2. Peningkatan harga diri (self-esteem) – rasa percaya diri dan martabat sebagai manusia yang produktif.
3. Kebebasan dari penindasan (freedom from servitude) – kebebasan untuk menentukan kehidupan sendiri dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan ketiga teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, meningkatnya kemandirian ekonomi, dan terciptanya kehidupan yang bermartabat. Dalam penelitian ini, konsep kesejahteraan dioperasionalkan melalui pendekatan kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat, sesuai dengan teori Todaro yang menekankan pembangunan berbasis manusia.

2.5.2 Indikator Kesejahteraan Ekonomi Keluarga

Untuk mengukur kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat (KPM), diperlukan indikator yang mencerminkan kondisi ekonomi, sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi di mana keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidup layak, baik secara material maupun nonmaterial, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

Menurut BPS dan Kementerian Sosial (2024), indikator kesejahteraan ekonomi keluarga dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Pendapatan Keluarga

Tingkat pendapatan menjadi ukuran paling langsung dari kesejahteraan ekonomi. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar. Program BST diharapkan mampu menambah daya beli masyarakat dan meningkatkan pendapatan jangka pendek keluarga miskin.

2. Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi mencerminkan daya beli dan kesejahteraan ekonomi keluarga. World Bank (2022) menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga adalah indikator utama keberhasilan program bantuan tunai dalam menurunkan angka kemiskinan.

3. Kepemilikan Aset Produktif

Kepemilikan aset seperti lahan, usaha kecil, atau kendaraan kerja merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan ekonomi jangka panjang. Menurut Matondang et al. (2024), penerima BST yang mampu mengalokasikan sebagian bantuan untuk kegiatan produktif menunjukkan peningkatan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan.

4. Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan

Kesejahteraan juga mencakup kemampuan keluarga mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Menurut UNDP (2022), keberhasilan kebijakan sosial diukur dari peningkatan *Human Development Index (HDI)* melalui pendidikan dan kesehatan dasar.

5. Kondisi Perumahan dan Lingkungan

Kualitas tempat tinggal dan lingkungan sosial menjadi bagian dari kesejahteraan fisik keluarga. Keluarga yang tinggal di rumah layak huni dan lingkungan aman menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik (BPS, 2023).

6. Partisipasi Ekonomi dan Sosial

Partisipasi dalam kegiatan ekonomi (seperti UMKM, koperasi, atau pekerjaan informal) dan sosial (gotong royong, komunitas lokal) juga menjadi indikator kesejahteraan sosial. Menurut Suharto (2022), kesejahteraan tidak hanya dilihat dari aspek material, tetapi juga dari tingkat keterlibatan sosial masyarakat.

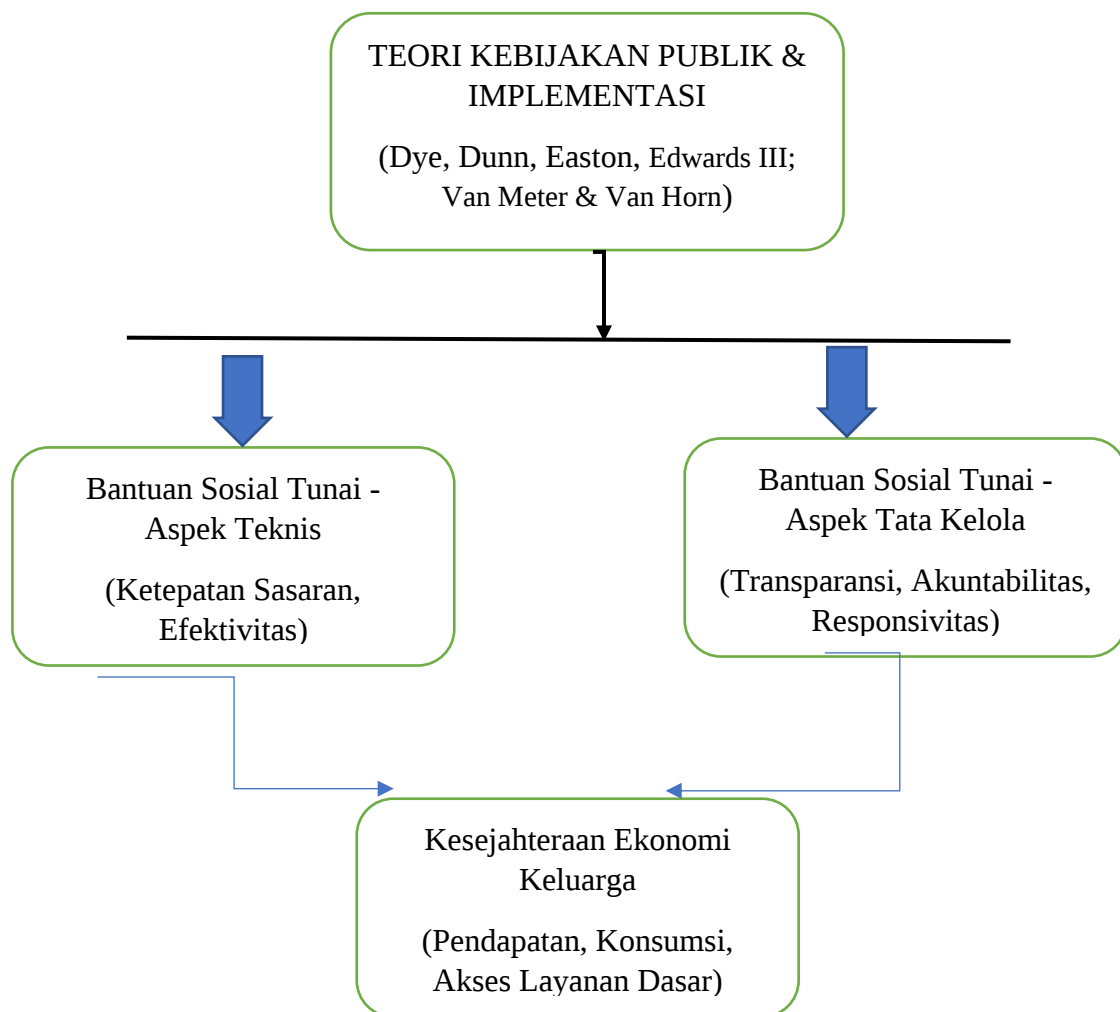
Dengan demikian, indikator kesejahteraan ekonomi keluarga mencakup aspek pendapatan, konsumsi, kepemilikan aset, serta akses terhadap layanan dasar. BST sebagai bentuk kebijakan sosial diharapkan mampu meningkatkan indikator-indikator tersebut, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah di Kota Palembang.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan dasar konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel penelitian yang diturunkan dari teori-teori yang telah dibahas sebelumnya. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir dibangun berdasarkan teori kebijakan publik (Dye, 2017; Dunn, 2018), teori implementasi kebijakan (Edwards III, Van Meter & Van Horn), teori administrasi publik modern (Denhardt & Denhardt, 2015;

UNDP, 2018), serta teori kesejahteraan sosial (Maslow, 2019; Todaro & Smith, 2020).

Tujuan dari kerangka berpikir ini adalah untuk menggambarkan alur hubungan logis antara kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagai variabel independen (X) dengan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat sebagai variabel dependen (Y).



2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- H_0 (Hipotesis Nol): Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat di Kota Palembang.
- H_1 (Hipotesis Alternatif): Terdapat pengaruh signifikan antara Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat di Kota Palembang.

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis melalui pengolahan data numerik dan analisis statistik guna mengetahui hubungan atau pengaruh antarvariabel yang telah ditetapkan.

Menurut Sugiyono (2021), penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Data penelitian diolah menggunakan alat statistik untuk memperoleh kesimpulan yang objektif.

Sementara itu, tipe penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih (Indriantoro & Supomo, 2019). Dalam konteks penelitian ini, tipe asosiatif digunakan untuk menganalisis pengaruh Bantuan Sosial Tunai (variabel X) terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (variabel Y) di Kota Palembang.

Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana program Bantuan Sosial Tunai (BST) berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat penerima manfaat.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2021:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang tahun 2025. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Palembang (2025), terdapat sebanyak 48.900 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 18 kecamatan.

Namun karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada beberapa kecamatan dengan jumlah penerima terbanyak, yaitu Kecamatan Seberang Ulu II, Kertapati, dan Ilir Timur II, yang dianggap mewakili karakteristik umum penerima BST di Kota Palembang.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili karakteristik keseluruhan populasi (Arikunto, 2019). Dalam menentukan jumlah sampel, penelitian ini menggunakan rumus Slovin, dengan tingkat kesalahan (error tolerance) sebesar 20% agar jumlah responden tidak terlalu besar tetapi tetap representatif.

Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

- n = jumlah sampel
- N = jumlah populasi
- e = batas kesalahan (error tolerance)

Substitusi nilai:

$$n = \frac{48.900}{1 + 48.900(0,20)^2}$$

$$n = \frac{48.900}{1 + 1.956}$$

$$n = \frac{48.900}{1.957} \approx 25,0$$

Sehingga jumlah sampel dibulatkan menjadi 20 responden agar lebih realistis dalam pengumpulan data di lapangan.

Jumlah ini dinilai cukup untuk mewakili populasi karena karakteristik penerima BST relatif homogen, yaitu keluarga berpenghasilan rendah penerima bantuan

sosial tunai. Selain itu, ukuran sampel 20 responden masih dapat digunakan untuk analisis regresi linier sederhana dengan data deskriptif (Field, 2018).

3.3 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2021:39), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel yang digunakan, yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat).

Tabel 3.3 Variabel Penelitian

NO	Jenis Variabel	Nama Variabel	Simbol	Definisi Singkat	Sumber Teori
1.	Variabel Independen (X)	Bantuan Sosial Tunai (BST)	X	Program bantuan keuangan langsung dari pemerintah kepada masyarakat miskin untuk menjaga daya beli dan mengurangi beban ekonomi keluarga berpenghasilan rendah.	Kementerian Sosial RI (2025), Rahardi et al. (2023)
2.	Variabel Dependen (Y)	Kesejahteraan Ekonomi Keluarga	Y	Kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar rumah tangga seperti pendapatan, konsumsi, dan akses terhadap layanan dasar yang memadai.	Todaro & Smith (2020), BPS (2024)

Variabel Independen (X): Bantuan Sosial Tunai (BST)

Merupakan variabel yang memengaruhi atau diduga menjadi faktor penyebab perubahan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Variabel ini mencakup aspek ketepatan sasaran, efektivitas, dan manfaat bantuan sosial tunai yang diterima masyarakat Kota Palembang.

Variabel Dependen (Y): Kesejahteraan Ekonomi Keluarga

Merupakan variabel yang dipengaruhi oleh program Bantuan Sosial Tunai (BST). Kesejahteraan ekonomi diukur melalui indikator peningkatan pendapatan, kemampuan konsumsi, serta akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Hubungan Antarvariabel

Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini bersifat sebab-akibat (kausal), di mana:

- Bantuan Sosial Tunai (X) berperan sebagai variabel bebas,
- sedangkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga (Y) berperan sebagai variabel terikat.

Dengan kata lain, perubahan dalam tingkat Bantuan Sosial Tunai yang diterima diharapkan akan memengaruhi perubahan dalam kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat.

3.4 Distribusi Sampel Penelitian

Meskipun penelitian ini menggunakan data sekunder dan tidak melibatkan responden langsung, peneliti tetap menetapkan distribusi populasi penelitian berdasarkan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Palembang. Distribusi ini digunakan untuk menggambarkan persebaran keluarga penerima manfaat (KPM) yang menjadi dasar pengolahan data kuantitatif.

Tabel berikut menunjukkan sebaran jumlah KPM BST berdasarkan kecamatan di Kota Palembang tahun 2025, sebagaimana dilaporkan oleh Dinas Sosial Kota Palembang (2025):

No.	Kecamatan	Jumlah KPM BST	Persentase (%)
1	Seberang Ulu II	12.812	26,2
2	Kertapati	10.540	21,5
3	Ilir Timur II	8.624	17,6
4	Ilir Timur I	6.910	14,1
5	Plaju	5.214	10,6
6	Sukarami	4.800	9,8
Total		48.900	100

Sumber: Dinas Sosial Kota Palembang, 2025.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian ilmiah, pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting karena menentukan kualitas hasil analisis yang akan diperoleh. Menurut Sugiyono (2021:145), teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data empiris yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik dari segi keabsahan (validitas) maupun konsistensinya (reliabilitas).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program Bantuan Sosial Tunai (BST) terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat di Kota Palembang. Namun, penelitian ini tidak dilakukan secara langsung di lapangan karena keterbatasan waktu, biaya, dan akses terhadap responden. Sebagai gantinya, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif berbasis data sekunder dengan dukungan studi kepustakaan (library research). Metode ini memungkinkan peneliti tetap memperoleh data kuantitatif yang valid melalui sumber resmi dan literatur ilmiah tanpa perlu melakukan survei langsung kepada responden.

3.5.1 Pendekatan Umum Pengumpulan Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada metode analisis kuantitatif non-survei, di mana data yang dikumpulkan merupakan data numerik hasil publikasi lembaga resmi dan hasil penelitian terdahulu. Menurut Creswell & Creswell (2018), metode ini tetap sah digunakan dalam penelitian kuantitatif selama data yang dianalisis memiliki karakteristik terukur, dapat dihitung, dan diolah secara statistik.

Peneliti menggabungkan dua teknik utama pengumpulan data, yaitu:

1. Teknik dokumentasi, untuk memperoleh data empiris sekunder dari lembaga pemerintah.
2. Teknik studi kepustakaan, untuk mengumpulkan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis.

Dengan dua pendekatan ini, peneliti berupaya menyusun pemahaman yang utuh mengenai implementasi program Bantuan Sosial Tunai di Kota Palembang dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga.

3.5.2 Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder kuantitatif yang sudah tersedia dan telah dipublikasikan oleh lembaga resmi. Menurut Arikunto (2019), dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan, laporan, arsip, atau dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai sumber berikut:

- Dinas Sosial Kota Palembang (2025), yang menyediakan data mengenai jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Sosial Tunai, total dana bantuan yang disalurkan, serta distribusi penerima berdasarkan kecamatan.

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang (2024), yang memberikan informasi mengenai tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta indikator kesejahteraan rumah tangga di wilayah penelitian.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia (2025), yang menyediakan laporan nasional terkait realisasi program perlindungan sosial, termasuk BST, PKH, dan BPNT.
- Laporan Pemerintah Daerah serta data dari situs resmi Pemkot Palembang untuk memperkuat konteks lokal terkait program bantuan sosial.

Data dari sumber-sumber ini dikumpulkan, diseleksi, dan diolah menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif.

Langkah-langkah pengumpulan data melalui dokumentasi meliputi:

1. Mengidentifikasi lembaga dan sumber data resmi yang relevan.
2. Mengunduh dan menelaah laporan tahunan atau publikasi yang diterbitkan secara daring.
3. Mencatat variabel penting seperti jumlah penerima BST, besaran bantuan, dan indikator kesejahteraan ekonomi.
4. Mengelompokkan data berdasarkan tahun, wilayah, dan kategori penerima untuk kemudian dianalisis lebih lanjut.

Dengan teknik ini, peneliti tetap dapat memperoleh gambaran empiris yang representatif mengenai dampak kebijakan BST tanpa melakukan survei lapangan langsung.

3.5.3 Teknik Studi Kepustakaan (Library Research)

Selain teknik dokumentasi, peneliti juga menggunakan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Menurut Nazir (2017), studi kepustakaan adalah cara untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah berbagai literatur, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi guna membangun kerangka teoritis penelitian.

Melalui studi kepustakaan, peneliti menelaah dan menganalisis berbagai teori dan hasil penelitian sebelumnya, antara lain:

- Teori kebijakan publik oleh Dunn (2018) yang menjelaskan pentingnya efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan sosial.
- Teori kesejahteraan ekonomi rumah tangga oleh Todaro & Smith (2020) sebagai dasar konseptual variabel dependen.
- Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) oleh UNDP (2018) sebagai acuan memahami mekanisme implementasi kebijakan sosial.
- Penelitian terdahulu seperti Rahardi et al. (2023) dan Azizah & Rahmawati (2024) yang membahas efektivitas bantuan sosial tunai di berbagai wilayah Indonesia.

Proses studi kepustakaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan kata kunci pencarian seperti "*Bantuan Sosial Tunai*", "*kesejahteraan ekonomi keluarga*", dan "*efektivitas kebijakan sosial*".
2. Mengakses database jurnal nasional dan internasional (Google Scholar, DOAJ, Sinta).
3. Menyeleksi literatur yang relevan, terbit minimal dalam tujuh tahun terakhir (2018–2025).
4. Mengutip, merangkum, dan membandingkan hasil penelitian terdahulu untuk memperkuat dasar analisis.

Hasil telaah pustaka kemudian dijadikan landasan dalam menyusun kerangka teori, hipotesis penelitian, serta instrumen analisis.

3.6 Validitas dan Reliabilitas Data

Meskipun penelitian ini tidak mengumpulkan data primer secara langsung, peneliti tetap memastikan bahwa data yang digunakan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Menurut Ghazali (2020), validitas data menunjukkan sejauh mana data yang digunakan benar-benar mengukur fenomena yang diteliti, sedangkan reliabilitas mengacu pada tingkat konsistensi data tersebut.

Untuk menjamin keandalan data, langkah-langkah berikut dilakukan:

1. Verifikasi sumber hanya menggunakan data dari lembaga resmi pemerintah (BPS, Kemensos, Dinsos) dan jurnal ilmiah yang telah melalui proses *peer review*.
2. Konsistensi antar-sumber membandingkan data dari beberapa publikasi berbeda untuk memastikan kesesuaian angka dan tren.
3. Kelayakan waktu memastikan data terbaru digunakan (maksimal lima tahun terakhir) agar hasil analisis relevan dengan kondisi sosial ekonomi terkini.
4. Keterlacakan sumber setiap data atau kutipan selalu mencantumkan rujukan yang jelas untuk menjaga keabsahan akademik.

Langkah-langkah tersebut menjamin bahwa meskipun penelitian ini berbasis data sekunder, hasilnya tetap valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alianti, T. Y., Erawan, I. K. P., & Erviantono, T. (2024). *The Application of David Easton System Theory in the Policy-Making Process of Using Foreign Workers in Indonesia*. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(6).
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Kemiskinan dan Kesejahteraan Kota Palembang Tahun 2024*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 Turun Menjadi 9,04 Persen*. Jakarta: BPS.
- Cairney, P. (2012). *Understanding Public Policy: Theories and Issues*. London: Palgrave Macmillan.
- CNN Indonesia. (2024). *Kemensos Hapus 1,9 Juta Data Ganda Penerima Bansos*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Detik News. (2024). *Bansos Masih Rentan Politisasi Menjelang Pemilu 2024*. Diakses dari <https://news.detik.com/>
- Dinas Sosial Kota Palembang. (2025). *Laporan Data Penerima Bantuan Sosial Tunai Tahun 2025*. Palembang: Dinas Sosial Kota Palembang.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson Education.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). London: SAGE Publications.
- Ghozali, I. (2020). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grindle, M. (2019). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.

- Hadna, A. H., & Askar, M. (2022). *The Impact of Conditional Cash Transfers on Low-Income Individuals in Indonesia*. *Advances in Southeast Asian Studies*, 15(1), 23–41.
- Holden, C. (2020). *Global Social Policy: An Application of Welfare State Theory*. *Journal of International and Comparative Social Policy*, 34(1).
- Kementerian PAN-RB. (2024). *Laporan Nasional Evaluasi Ketepatan Sasaran Program Bansos*. Jakarta: KemenPAN-RB.
- Kementerian PAN-RB. (2025). *Laporan Evaluasi Ketepatan Sasaran Program Bantuan Sosial Tahun 2025*. Jakarta: KemenPAN-RB.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Laporan Penyaluran Program Perlindungan Sosial Triwulan I Tahun 2025*. Jakarta: Kemensos RI.
- Kompas. (2024). *Masalah Validitas Data Bansos Masih Jadi Kendala Nasional*. Diakses dari <https://www.kompas.com/>
- Loso, J., Yumame, J., & Pugu, M. R. (2024). *Implementation of Public Policy in Improving Public Welfare*. *ADMIN: Jurnal Administrasi Negara*, 2(3).
- Mas'udi, W., & Hanif, H. (2023). *Welfare Politics in Contemporary Indonesia: Examining Welfare Vision of Law 11/2009*. *PCD Journal*, 5(2).
- Matondang, K. A., Dwi Pratama, V., Sitorus, M., & Situmorang, E. J. (2024). *Pengaruh Bantuan Sosial terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015–2019*. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 3905–3910.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan Publik di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Parsons, W. (2018). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Rahardi, A., Kariem, M. Q., & Febriyanti, D. (2023). *Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai pada Masa Pandemi COVID-19 di Dinas Sosial Kota Palembang*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP UNJA)*, 7(1), 112–126.
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). *Analisis Efektivitas Bantuan Sosial (Bansos) dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia*. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 45–57.

- Setiawan, R., & Hartono, A. (2021). *Analisis Implementasi Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi COVID-19*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 9(2), 123–134.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supakitpaisan, K. (2024). *Developing a Basic Conceptual Framework for Social Welfare Management in Thailand*. Journal of Arts and Thai Studies, 46(2).
- The Impact of Cash Transfer on Household Spending Behaviour. (2023). *Proceedings of Atlantis Press on Economics and Social Sciences*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson Education.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *A Model of the Policy Implementation Process*. Administration & Society, 6(4), 445–488.
- Winarno, B. (2018). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yuda, T. K. (2023). *Governing Alternative Resources for Social Policy: A Welfare Political Challenges on Mixed Welfare Arrangements*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP), 27(3).